



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 63 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di daerah provinsi dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pengelola pengadaan barang dan jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

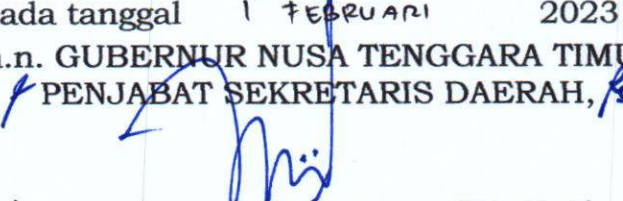
MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


J. **JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 63 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	PERANGKAT DAERAH BINAAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT

3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<p>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</p>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<p>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</p>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<p>a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</p>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT

6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
8.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pembagian tugas bagi seluruh Tim Pengelola dan Pembina Pengadaan Barang dan Jasa pada rapat pembahasan/asistensi anggaran TAPD; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan d. mengawasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT

9.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	<p>a. memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;</p> <p>e. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. melaporkan hasil laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT
10.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<p>a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

			<p>d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; dan</p> <p>f. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>	<p>5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT</p> <p>6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT</p> <p>7) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT</p> <p>8) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT</p> <p>9) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT</p> <p>10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT</p> <p>11) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT</p> <p>12) Badan Penghubung Provinsi NTT</p> <p>13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT</p> <p>14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT</p> <p>15) Dinas Sosial Provinsi NTT</p>
--	--	--	--	--

11.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<p>a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; dan</p> <p>f. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>	<p>1) Biro Umum Setda Provinsi NTT</p> <p>2) Dinas Peternakan Provinsi NTT</p> <p>3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT</p> <p>4) Inspektorat Provinsi NTT</p> <p>5) Dinas Kesehatan Provinsi NTT</p> <p>6) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT</p> <p>7) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT</p> <p>8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT</p> <p>9) Dinas Perhubungan Provinsi NTT</p> <p>10) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT</p> <p>11) Biro Hukum Setda Provinsi NTT</p> <p>12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT</p>
-----	---	----------------	--	--

12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<p>a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 5) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang 6) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 8) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 9) Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 10) Biro Administasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 11) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
-----	--	-----------------	--	---

13.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Strategi PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis I	<p>a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada PD binaannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT 7) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT 8) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT 10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT 11) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 12) Badan Penghubung Provinsi NTT 13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
-----	---	----------------------	--	--

				<p>14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT</p> <p>15) Dinas Sosial Provinsi NTT</p>
14.	<p>Mardiosy E. Rih Ratu, SH/Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pelaksanaan PBJ pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi NTT</p>	<p>Koordinator Teknis II</p>	<p>a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada PD binaannya.</p>	<p>1) Biro Umum Setda Provinsi NTT</p> <p>2) Dinas Peternakan Provinsi NTT</p> <p>3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT</p> <p>4) Inspektorat Provinsi NTT</p> <p>5) Dinas Kesehatan Provinsi NTT</p> <p>6) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT</p> <p>7) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT</p> <p>8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT</p> <p>9) Dinas Perhubungan Provinsi NTT</p> <p>10) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT</p> <p>11) Biro Hukum Setda Provinsi NTT</p> <p>12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT</p>

15.	Dominika Odelberta G. Pawe, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pemantauan dan Evaluasi PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis III	<p>a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada PD binaannya.</p>	<p>1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT</p> <p>2) Biro Pengadaan Barang Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT</p> <p>3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT</p> <p>4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT</p> <p>5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT</p> <p>6) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang</p> <p>7) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT</p> <p>8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT</p> <p>9) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT</p> <p>10) Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT</p> <p>11) Biro Administasi Pimpinan Setda. Provinsi NTT</p> <p>12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi</p>
-----	--	------------------------	---	---

			NTT	
16.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi I	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 4) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
17.	Kollo Thalib, SP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 4) Biro Perekonomian dan
18.	Kornelis Kopong Bolen, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

19.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
20.	Petrus Lemba, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
21.	Magdalena Mensiana, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	
22.	Hanok Melkianus Manesi, SH/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
23.	Rufaida Ema Wokan, S.Ak/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
24.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Administrasi II	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;	1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT
25.	Yustin Elvry Toka, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	2) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
26.	Octovianus Gollu Tena, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan	3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov NTT 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT 5) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

27.	Alexandro Benigno Lake, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
28.	Leoncio Theresa Araujo/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	
29.	Maria Anabela Dos Reis/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
30.	Angelina Sudi, S.Th/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		h. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;	
31.	Thobias R. Foenale, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		i. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/ Perubahan Anggaran bersama TAPD;	
			j. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	
			k. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	
			l. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
			m. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	
			n. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	

32.	Yanes G. Panie, S.STP, M.Pub.Pol/ Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub koordinator Substansi Pengelolaan Informasi PBJ dan Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi III	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	1) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 2) Badan Penghubung Provinsi NTT 3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 5) Dinas Sosial Provinsi NTT
33.	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
34.	Theodora Lue/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
35.	Romanus Leur, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
36.	Emiliana Fatima Manek/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
37.	Denvinoputra E. Habid, BA (HONS)/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
38.	Arisanti Meliani, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

39.	James. P. Nenobais, S.STP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
40.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
41.	Aurick Ardy Firdaus Sigit, S.Ds/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
42.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi IV	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	1) Biro Umum Setda Provinsi NTT 2) Dinas Peternakan Provinsi NTT 3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT 4) Inspektorat Provinsi NTT
43.	Anwar Harijana, S.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;	
44.	Maglon Teuf, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
45.	Julita Marleni Laning, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	
46.	Rivantius Foyh, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

47.	Riky Dedison Rihi Pake, S.Farm. Apt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
48.	Hubertus Haji, SE / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
49.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi V	<p>a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;</p> <p>b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Prov. NTT;</p> <p>e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</p>	<p>1) Dinas Kesehatan Provinsi NTT</p> <p>2) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT</p> <p>3) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT</p> <p>4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT</p>
50.	Susana Irene H. Lukas, ST, M.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
51.	Suharto Robert Kenedy/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
52.	Emerensiana Sonia Cristye Kina Ola, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
53.	Semuel S. A. E. Toelle/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
54.	Ignatius Origenes Bewat, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

55.	Herlince Pollo, S.Pd/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
56.	Aries Sudharmono, S.Pt/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
57.	Rofinus Raja Waking / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
58.	Sofi J. Messakh, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi VI	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	1) Dinas Perhubungan Provinsi NTT 2) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT 3) Biro Hukum Setda Provinsi NTT 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
59.	Frans Budiman Johannes, S.Sos., M.Si/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
60.	Patrisia Yulistriani Djami, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
61.	Siprianus Talan/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

62.	Zet Amnifu, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
63.	Septian Maradona Tanamal/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
64.	Boby Lodovic Da Costa, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
65.	Mega Olyvia Clarita Manu, S.Ab/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
66.	Wilbrodus Wora, SE, M.Ec. Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Administrasi VII	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan	1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
67.	Jans E. Z. Sibui, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
68.	Oktovianus Robinson Bire, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
69.	Jacobis Ferdinand Zacharias/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			
70.	Hendrico T. Aman, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

71.	Yulianti Rosiana Pandie/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
72.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Administrasi VIII	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 2) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
73.	Samuel Arie Parera, ST/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	3) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
74.	Dance Markus Benyamin Pison, SE/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
75.	Alexandro D. A. D. Saju, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	
76.	Gregorius Saverius Heran Leuehag/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT			

77.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Administrasi IX	a. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis;	1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
78.	Arabinaya L. Lumbu Lamba, S.Pt, MM/ Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	2) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
79.	Franky Juhar, S.Kom/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	3) Biro Administasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
80.	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan strategis dan non strategis pada PD Lingkup Provinsi NTT;	4) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
81.	Betrix P. Fernandez, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
82.	Mikael Sogan, A.Md/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan	
			g. menghimpun data dan melaporkannya ke Koordinator Teknis untuk penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015